

**Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Responsivitas Dana Desa
Terhadap Pemerintahan Desa: Studi Kasus di Kecamatan Ngunut**

Ferlian Aca Lusita¹, Anwar Made², Dimas Emha Amir Fikri Anas³

Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

ferlianacha@gmail.com¹, anwarmade18@gmail.com², dimas@unikama.ac.id³

ABSTRACT

This research aims to analyze the influence of transparency, accountability, and responsiveness of village funds on the performance of village governance. The main theory used in this research is Stewardship Theory, which states the existence of local administration as one of the trusted institutions in accordance with its obligations and functions. The research method employed is a quantitative approach using data collection techniques through questionnaires filled out by village heads, village secretaries, treasurers, and heads of service sections. The collected data is numerical and is processed using the Smart PLS application. The results of this study show that transparency and accountability have a significant effect on the performance of village governance, while responsiveness does not have an effect on the performance of village governance.

Keywords: *Transparency, Accountability, Responsiveness, Village Government Performance*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas dana desa terhadap kinerja pemerintahan desa. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Stewardship Theory* yang menyatakan keberadaan administrasi local sebagai salah satu lembaga yang dapat dipercaya sesuai dengan kewajiban dan fungsinya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui kuisioner yang diisi oleh kepala desa, sekretaris desa, bendahara dan kepala seksi pelayanan. Data yang terkumpul berupa angka dan diolah menggunakan aplikasi Smart PLS. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintahan desa, sedangkan responsivitas tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan desa.

Kata kunci: *Transparansi; Akuntabilitas; Responsivitas; Kinerja Pemerintahan Desa*

PENDAHULUAN

Pemerintah desa memiliki peranan penting dalam memajukan wilayahnya serta melayani masyarakat. Sebagai fondasi utama pemerintahan, desa melakukan kontak langsung dengan masyarakat dan berkewajiban untuk mewujudkan kebutuhan serta aspirasi warganya. Oleh karena itu, kinerja pemerintahan desa perlu dikelola dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), khususnya transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas. Dalam konteks ini, transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas menjadi tiga pilar utama yang mendukung kinerja pemerintahan desa.

Disebutkan dalam peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018, bahwa salah satu factor keberhasilan dalam pengelolaan dana desa untuk terimplementasinya fungsi pemerintahan desa telah dipengaruhi oleh kinerja perangkat desa. Kinerja kepala desa berdampak besar pada peningkatan pengelolaan dana desa dan peningkatan pencapaian program desa (Faizah, 2024).

Transparansi mengacu pada keterbukaan pemerintah desa dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait kebijakan, program, dan pengelolaan keuangan desa. Masyarakat harus dapat mengakses informasi dengan mudah, baik melalui papan pengumuman, website desa, atau laporan pertanggungjawaban yang disampaikan secara rutin (Faizin & Umaimah, 2023).

Responsivitas merupakan kemampuan untuk mengenali kebutuhan masyarakat, mempersiapkan lembaga dan mengembangkan program layanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara ringkas, responsivitas mengacu pada keselarasan dalam program dan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat (Azizah & Kholifah R, 2023).

Adapun kasus terbaru yaitu korupsi dana desa sebesar Rp 526.000.000,- yang dilakukan oleh kepala desa di Belitung selatan. Pelaku selaku kepala desa ditetapkan sebagai tersangka dan dijatuhi hukuman dengan pasal berlapis (Firmansyah, 2025).

Penangkapan perangkat desa terkait kasus penyalahgunaan dana desa merupakan salah satu contoh nyata dari upaya pemberantasan korupsi di tingkat pemerintahan local. Kasus ini melibatkan kepala dusun di desa Ngunut yang melakukan praktik pungutan liar dengan tidak memberikan dana Bantuan Langsung Tunai secara penuh. Kepala dusun tersebut hanya memberikan Rp 100.000 dari dana yang seharusnya diterima sebesar Rp 600.000. Berdasarkan praktik pungutan liar yang telah terjadi tindakan tersebut masuk ke dalam kualifikasi tindakan korupsi yang telah dicantumkan dalam Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 yang berisi tentang tindak pidana dan denda sebesar Rp 200.000.000 sampai Rp 1.000.000.000 (Dewi, 2021).

Kecamatan Ngunut di Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu wilayah yang memiliki karakteristik unik yang mencerminkan dinamika pemerintahan desa di Indonesia, diantaranya adalah keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat, dan mengalami perkembangan cukup pesat terutama di bidang UMKM yang semakin banyak dan mengikuti perkembangan yang ada baik zaman maupun teknologi. Sebagai daerah yang memiliki banyaknya masyarakat yang memiliki UMKM, desa-desa di Kecamatan Ngunut menghadapi tantangan untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kinerja pemerintahan desa yang transparansi, akuntabel, dan responsivitas menjadi sangat krusial.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas dalam

kinerja pemerintahan desa di Kecamatan Ngunut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai praktik tata kelola pemerintah desa serta menjadi masukan bagi upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat desa, karena konsep ini saling mendukung satu sama lain. Transparansi meningkatkan akuntabilitas, akuntabilitas mendorong responsivitas, dan responsivitas yang baik berkontribusi pada kinerja pemerintahan yang lebih baik.

TINJAUAN LITERATUR

Stewardship Theory

Teori yang relevan adalah *Stewardship Theory*, yang dimana teori ini menggambarkan hubungan antara pemerintah desa sebagai *Steward* (pengelola) yang termotivasi untuk mencapai tujuan utama mereka semata-mata demi kepentingan organisasi dan mengesampingkan tujuan individu maupun kelompok. Dalam konteks ini *Stewardship* menjadi landasan manajemen mengarah pada tindakan sesuai dengan keinginan *principal* (masyarakat) (Nur, 2023).

Teori ini menyoroti pemisahan dari fungsi-fungsi untuk menghasilkan kepercayaan dan menerapkan akuntabilitas dalam mengelola pemerintahan desa. Sehubungan dengan organisasi sector publik, teori ini dapat digunakan untuk memaksimalkan manfaat utama dan manfaat administrative dan menciptakan hubungan di mana pemerintah bertanggung jawab memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kinerja Pemerintahan Desa

Kinerja pemerintahan desa diukur dari seberapa efektif dan efisien pemerintah desa dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kinerja dapat dinilai melalui beberapa indikator, seperti kualitas pelayanan publik, pengelolaan keuangan, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kinerja merupakan kemampuan yang dilakukan untuk mendapatkan hasil kerja yang diharapkan ke arah tercapainya tujuan lembaga (Kurniaty, 2023). Kinerja yang baik akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat desa.

Indikator kinerja pemerintah desa, meliputi :

- a. Kualitas pelayanan, menilai seberapa baik pelayanan yang diberikan kepada masyarakat,
- b. Pengelolaan keuangan, mengukur kemampuan pemerintah desa dalam mengelola anggaran dan sumber daya keuangan secara transparan dan akuntabel,
- c. Partisipasi masyarakat, tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan.

Transparansi

Transparansi dalam konteks pemerintahan desa merujuk pada keterbukaan informasi yang disediakan oleh pemerintah desa kepada masyarakat. Hal ini mencakup aksesibilitas informasi mengenai kebijakan program dan pengelolaan anggaran desa. Menurut “UU No. 6 Tahun 2014” tentang Desa, pemerintah desa diwajibkan untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. Transparansi tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa tetapi juga mendorong partisipasi publik dalam pembangunan (Padilah et al., 2023).

Indikator transparansi (Nurlailah et al., 2020) meliputi :

- a. Keterbukaan informasi mengenai jumlah dana desa yang diterima,
- b. Keterbukaan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program desa, dan
- c. Ketersediaan dan aksesibilitas informasi publik.

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan yang diambil kepada masyarakat. Akuntabilitas mencakup aspek keuangan, operasional dan hasil dari program-program yang dilaksanakan. Dalam konteks ini laporan pertanggungjawaban harus disampaikan secara berkala dan dapat dipahami oleh masyarakat (Balsano Amryanto Bhoka et al., 2023). Dengan adanya akuntabilitas, masyarakat dapat mengevaluasi kinerja pemerintah desa dan menuntut pertanggungjawaban jika terjadi penyimpangan.

Indikator akuntabilitas (Nurlailah et al., 2020) meliputi :

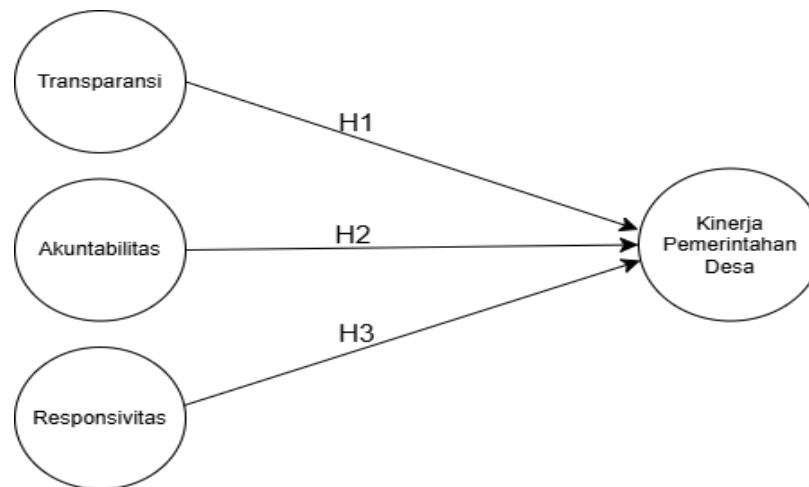
- a. Penyusunan dan pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa secara berkala,
- b. Kesesuaian penggunaan dana dengan tujuan dan peraturan yang berlaku.

Responsivitas

Responsivitas mengacu pada kemampuan pemerintah desa untuk merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan cepat dan tepat. Pemerintah desa harus mampu mendengarkan suara masyarakat dan mengambil tindakan yang sesuai dengan harapan mereka. Responsivitas ini penting untuk menciptakan hubungan yang baik antara pemerintah desa dan warganya serta untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Pemerintah desa yang responsive dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program pembangunan (Kurniasih et al., 2022).

Indikator responsivitas, meliputi :

- a. Kecepatan dan ketepatan pelayanan publik,
- b. Keselarasan program/kebijakan dengan kebutuhan masyarakat.



Gambar 1. Model Penelitian

H1 : Transparansi berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintahan Desa

Transparansi dalam pemerintahan mengacu pada keterbukaan informasi yang memungkinkan masyarakat untuk mengawasi dan memahami tindakan pemerintah. Teori ini menyatakan bahwa transparansi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Armaningsih, 2019).

Dalam penelitian Faizin menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan desa (Faizin & Umaimah, 2023). Sedangkan, dalam penelitian lain menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan desa, karena diakibatkan oleh kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana sehingga mengakibatkan keraguan masyarakat terhadap pemerintah (Padilah et al., 2023). Dalam penelitian Kurniaty juga menyebutkan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan desa (Kurniaty, 2023).

H2 : Akuntabilitas berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintahan Desa

Akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan mereka kepada masyarakat. Teori ini menunjukkan bahwa akuntabilitas yang tinggi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan efektivitas program.

Dalam penelitian Harlina Kurniaty menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan desa (Kurniaty, 2023). Begitu juga dengan peneliti lain yang menyatakan akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan desa (Padilah et al., 2023). Karena pentingnya akuntabilitas dalam kinerja terutama pemerintahan.

H3 : Responsivitas berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintahan Desa

Responsivitas mengacu pada kemampuan pemerintah untuk merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Teori ini berargumen bahwa pemerintah yang responsive dapat meningkatkan kepuasan masyarakat dan efektivitas layanan. Dalam penelitian Dhea Nur Azizah dan Emy Kholifah menyatakan bahwa responsivitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan desa (Azizah & Kholifah R, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan desain penelitian dengan spesifikasi sistematis, terencana, dan terstruktur berlandaskan pada filsafat *positivism*. Digunakan untuk meneliti suatu sampel pada populasi tertentu dengan teknik pengambilan secara acak dalam bentuk angka yang akan diolah secara statistik untuk menguji hipotesis yang sudah ditetapkan (Fadilla et al., 2023).

Data yang digunakan adalah data primer. Untuk memperoleh data dan informasi sesuai dengan penelitian ini, peneliti menggunakan kuisioner (angket) yang kemudian diberikan kepada responden yaitu perangkat desa yang ada di wilayah kecamatan Ngunut.

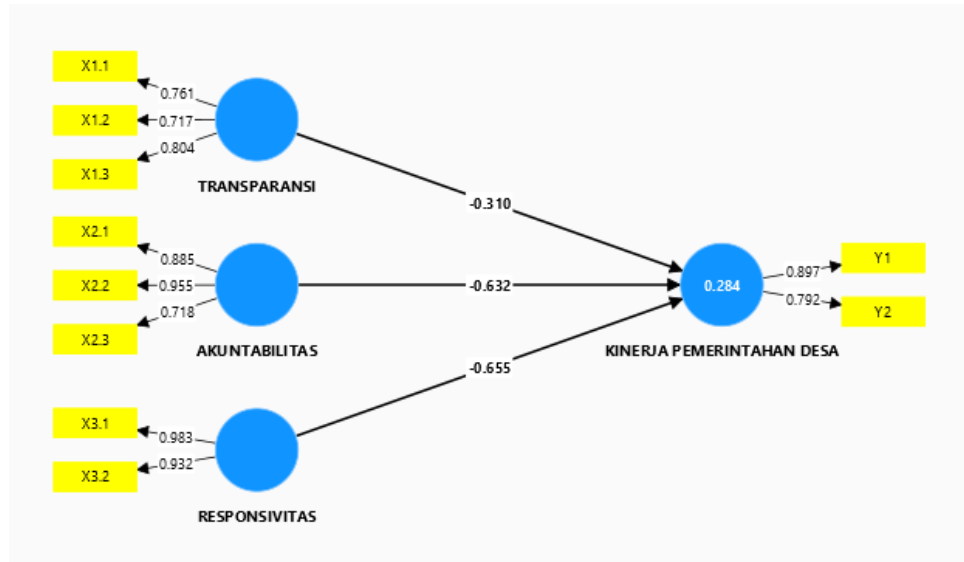
Untuk menguji pengaruh penerapan Transparansi (X1), Akuntabilitas (X2), dan Responsivitas (X3), terhadap Kinerja Pemerintahan Desa (Y) baik secara simultan maupun parsial di kecamatan Ngunut maka digunakan *software* Smart PLS. Dengan mengujikan statistic deskriptif, outer model, inner model, dan uji hipotesis.

Populasi diartikan sebagai seluruh objek penelitian yang dapat terdiri dari makhluk hidup, benda, gejala, nilai tes, atau peristiwa sebagai sumber data yang mewakili karakteristik tertentu dalam suatu penelitian. Populasi juga dapat diartikan sebagai keseluruhan unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga (Fadilla et al., 2023).

Populasi penelitian ini ialah seluruh desa yang ada di kecamatan Ngunut. Kecamatan Ngunut memiliki jumlah 18 kepala desa, 18 sekretaris desa, 41 kepala dusun, 41 pelaksana teknis lapangan, 90 kepala urusan, dan 36 kepala seksi (Tulungagung, 2021). Metode pemilihan sampel menggunakan purposive sampling dengan subjek yang menjadi titik focus pengamatan ini sebanyak 3 orang setiap desa yaitu kepala desa, sekretaris desa, dan kepala seksi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Outer Model



Gambar 2. Outer Loading

Outer loading merupakan nilai statistic yang mengukur kekuatan hubungan antara indikator pengukuran dengan variabel laten dalam model *Partial Least Squares Struktural Equation Modeling* (PLS-SEM). Nilai ini menjadi dasar dalam penilaian validitas konvergen pada tahap *outer model* assessment. Berdasarkan hasil analisis outer loading pada gambar 2, seluruh indikator pada variabel X dan Y memiliki nilai >0.7, sehingga dinyatakan valid karena menunjukkan hubungan yang kuat dan memenuhi validitas konvergen (Hair et al., 2011).

Uji Validitas dan Reliabilitas

Tabel 1. Construct Reliability and validity

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
Transparansi	0.674	0.638	0.805	0.580
Akuntabilitas	0.815	0.845	0.893	0.738
Responsivitas	0.918	1.233	0.957	0.917
Kinerja Pemerintahan Desa	0.613	0.656	0.834	0.717

Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas instrument penelitian pada tabel Construct Reliability and validity menunjukkan nilai Cronbach's Alpha >0,6 yang menunjukkan bahwa nilai tersebut *reliable* dalam penelitian (Herfiyanto et al., 2018).

Tabel 2. Hasil Discriminant Validity

	Transparansi	Akuntabilitas	Responsivitas	Kinerja Pemerintahan Desa
Transparansi				
Akuntabilitas	0.227			
Responsivitas	0.494	0.757		
Kinerja Pemerintahan Desa	0.293	0.374	0.243	

Pada pengujian validitas diskriminan menggunakan Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT), seluruh nilai HTMT antar struktur berada <0,90 yaitu berkisar antara 0,227 hingga 0,757. Nilai tersebut menunjukkan bahwa masing-masing struktur memiliki validitas diskriminan yang baik, sehingga struktur-struktur tersebut dapat dibedakan satu sama lain (Widowati & Purbojo, 2024). Berdasarkan hasil tersebut, instrument penelitian yang digunakan telah memenuhi syarat validitas dan reliabilitas, sehingga layak digunakan untuk analisis lebih lanjut dalam penelitian ini (Subhaktiyasa, n.d.).

2. Inner Model

Evaluasi model structural dan tingkat koefisien jalur merupakan bagian dari *inner model* pada analisis PLS SEM. Dengan melihat sejumlah indikator, seperti uji kecocokan model menggunakan koefisien determinasi *R-Square* (R^2) dan *F-Square* (F^2). Sementara itu, uji hipotesis, memprediksi hubungan variabel laten dengan memanfaatkan tingkat signifikan koefisien jalur (Widowati & Purbojo, 2024).

Koefisien Determinasi *R-Square* (R^2)

Tingkat di mana factor eksogen berperan terhadap variabel endogen ditunjukkan oleh koefisien determinasi atau *R-Square*. *R-Square* memiliki nilai antara 0 sampai dengan 1. Variabel independens menawarkan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi perubahan variabel endogen jika nilai *R-square* mendekati 1. Di sisi lain, semakin mendekati 0 nilai *R-Square*, semakin sedikit variabel independen dalam menjelaskan variabel endogen terbatas. Jika nilai *R-Square* >0,75 dianggap kuat, jika >0,50 tetapi >0,75 dianggap sedang, dan jika >0,25 tetapi <0,50 maka dianggap lemah (Hair et al., 2011 dalam Widowati & Purbojo, 2024).

Tabel 3. Nilai Koefisien Determinasi R-Square

Variabel Endogen		R-Square	R-Square Adjusted
Kinerja Desa	Pemerintahan	0.284	0.241

Berdasarkan tabel 3, *R-Square* menunjukkan angka 0.241 yang berarti rendah. Akan tetapi dalam penelitian menggunakan data primer, *R-Square* yang memiliki nilai 0.2 atau 0.3 dinyatakan sudah cukup baik karena fenomena social biasanya dipengaruhi banyak factor di luar model yang digunakan (Raharjo, 2019).

F-Square (F²)

Pengujian ini mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen tertentu terhadap variabel dependen dalam sebuah model. Nilai *F-Square* yang tinggi menunjukkan bahwa variabel tersebut memiliki pengaruh yang lebih substansial. Nilai *F-Square* yang umum digunakan adalah 0.02 (lemah), 0,15 (sedang), dan 0.35 (kuat) (Santoso & Akbar, 2022).

Tabel 4. Nilai Koefisien Determinasi R-Square

Kinerja Pemerintahan Desa	
Transparansi	0.112
Akuntabilitas	0.306
Responsivitas	0.287

Dari hasil uji *F-Square* menunjukkan bahwa akuntabilitas dan responsivitas memiliki pengaruh sedang terhadap kinerja pemerintahan desa dengan nilai akuntabilitas 0.306 dan responsivitas 0.287, karena nilainya berada di antara 0.15 dan 0.35. Sedangkan transparansi memiliki pengaruh lemah terhadap kinerja pemerintahan desa karena nilai *F-Square* sebesar 0.112 berada di bawah 0.15.

Pengujian Hipotesis

Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis

	Original Sample (O)	T Statistic	P Values
Transparansi -> Kinerja pemerintahan desa	-0.310	1.995	0.046
Akuntabilitas -> Kinerja pemerintahan desa	-0.632	2.257	0.024
Responsivitas -> Kinerja pemerintahan desa	-0.655	1.825	0.068

Dari tabel 5, menunjukkan hasil uji hipotesis dari transparansi terhadap kinerja pemerintahan desa dengan nilai original sample sebesar -0.310 dengan nilai T statistic 1.995 dan P Value 0.046. karena P Value <0.05, maka dapat disimpulkan bahwa H1 transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintahan desa. Artinya, semakin tinggi transparansi, maka kinerja pemerintahan desa juga cenderung meningkat secara signifikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan (Faizin & Umaimah, 2023) dan bertolak belakang dengan penelitian (Kurniaty, 2023) dan (Padilah et al., 2023), sehingga H1 diterima.

Akuntabilitas terhadap kinerja pemerintahan desa (H2) menunjukkan nilai original sample sebesar -0.632 dengan T statistic 2.257 dan P Values sebesar 0.024. karena P Value <0.05, H2 akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintahan desa. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas yang baik akan meningkatkan kinerja pemerintahan desa secara signifikan. Penelitian ini memiliki hasil yang sejalan dengan (Kurniaty, 2023) dan (Padilah et al., 2023), sehingga H2 diterima.

Responsivitas terhadap kinerja pemerintahan desa (H3) memiliki hasil nilai original sample sebesar -0.655 dengan T statistic 1.825 dan P Value sebesar 0.068, maka dapat disimpulkan bahwa responsivitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintahan desa. Dengan demikian, meskipun responsivitas memiliki nilai koefisien negative, pengaruhnya terhadap kinerja pemerintahan desa tidak signifikan secara statistic. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian (Azizah & Kholifah R, 2023) yang menyatakan bahwa responsivitas berpengaruh dengan kinerja pemerintahan desa. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh responsivitas terhadap kinerja pemerintahan desa ditolak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Transparansi dan akuntabilitas terbukti memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintahan desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintahan desa, maka semakin baik pula kinerja yang dihasilkan. Keterbukaan dalam pengelolaan dana desa serta pelaporan yang jelas dan dapat diakses masyarakat mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kepercayaan publik.

Begitu juga dengan responsivitas yang tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintahan desa, yang berarti kemampuan pemerintah desa dalam merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat belum memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja pemerintahan desa di Kecamatan Ngunut. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai factor, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya inovasi dalam pelayanan publik atau belum optimalnya mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat.

Seluruh indikator pada variabel penelitian memiliki outer loading di atas 0.7, dan nilai *Cronbach Alpha* serta HTMT menunjukkan hasil yang baik. Dengan demikian, data yang diperoleh layak untuk dianalisis lebih lanjut dan penelitian dapat dipercaya.

Saran untuk desa diharapkan dapat mengembangkan mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat yang lebih efektif, memperbaiki system pelayanan publik, serta meningkatkan kapasitas aparatur desa agar mampu merespon kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat. Dan juga perlunya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas khususnya pengelolaan dana desa dan pelaporan keuangan. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas variabel dan cakupan wilayah penelitian, serta menggali faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintahan desa, seperti partisipasi masyarakat, inovasi pelayanan, atau pemanfaatan teknologi informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Armaningsih, D. I. (2019). *Akuntansi dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Nur Handayani Stekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*. 1-25.
- Azizah, D. N., & Kholifah R, E. (2023). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Responsivitas dalam Pengelolaan APBDes terhadap Kepercayaan Publik. *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, 1(2), 1-9. <https://doi.org/10.47134/pssh.v1i2.117>
- Balsano Amryanto Bhoka, Andreas Rengga, & Wihelmina Maryetha Yulia Jaeng. (2023). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Detubinga Kecamatan Tanawawo. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 3(4), 158-172. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v3i4.873>
- Fadilla, Z., Zaini, P. M., Zaini, P. M., & Lawang, K. A. (2023). *Metodologi penelitian kuantitatif* (Issue May).
- Faizah, N. N. (2024). *Analisis Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Wadeng , Kecamatan Sidayu , Kabupaten Gresik) Cholis Hidayati Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Dengan Peraturan . 2.*
- Faizin, M. A., & Umaimah. (2023). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa Terhadap Kinerja Pemerintah. *JAMMI-Jurnal Akuntansi UMMI*, III(2), 75-85.
- Hair, J. F., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2011). *PLS-SEM : Indeed a silver bullet PLS-SEM : Indeed a Silver Bullet. March.* <https://doi.org/10.2753/MTP1069-6679190202>
- Herfiyanto, P., Hariadi, B., & Wahyuningtyas, N. (2018). Analisis Pola Penerimaan

Guru Terhadap Rapor Online Menggunakan Metode UTAUT (Studi Kasus Pada SMA Negeri 8 Surabaya). *Jsika*, 7(1), 1–9.

Kurniasih, D. R., Parawangi, A., Makassar, U. M., Makassar, U. M., & Makassar, U. M. (2022). *Responsivitas pelayanan pengaduan masyarakat di kepolisian sektor kecamatan uluere kabupaten bantaeng*. 3(April).

Kurniaty, H. (2023). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kinerja Pemerintahan Desa Pamait Di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022. *Pencerah Publik*, 10(1), 1–12. <https://doi.org/10.33084/pencerah.v10i1.4574>

Nur, H. R. (2023). *Pengaruh Tax Amnesty, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Penyuluhan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Wilayah Dki Jakarta*. 14(5), 1–23.

Nurlailah, Syamsul, & Rahman, A. (2020). Mengukur Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa : Studi Kasus Pada Desa-Desa di Kabupaten Sigi. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 151–165.

Padilah, P., Rahayu, S., & Yudi, Y. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Kejelasan Sasaran Anggaran, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Kabupaten Bungo). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 7(3), 180–191. <https://doi.org/10.22437/jaku.v7i3.25152>

Santoso, H., & Akbar, Z. (2022). *Analisis Sistem Informasi Keberhasilan Website Siap PPDB Online Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Dengan Metode Delone And Mclean*. 1(2), 70–82.

Subhaktiyasa, P. G. (n.d.). *Evaluasi Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Kuantitatif: Sebuah Studi Pustaka*. 5(4), 5599–5609.

Widowati, P. N., & Purbojo, R. (2024). *Pengaruh Kompetensi Integrasi Teknologi , Konten Dan Pedagogik (TPACK), Motivasi Kerja Dan Teachers ' Work Engagement Terhadap Kinerja Guru SD XYZ Cabang Bekasi*. 7, 216–226.

Media Online

Dewi, W. R. (2021). *Pungutan Liar Pada Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)*.

Firmansyah, M. I. (2025, Mei 21). *KOMPAS.com*. Retrieved from KOMPAS.com: <https://regional.kompas.com/read/2025/05/21/074137278/korupsi-dana-desa-rp-526-juta-kades-di-bengkulu-selatan-ditahan-polisi>

Raharjo, S. (2019, Maret 28). *SPSS Indonesia*. Retrieved from SPSS Indonesia: https://www.spssindonesia.com/2017/04/makna-koefisien-determinasi-r-square.html?utm_source=perplexity&m=1

Tulungagung, B. K. (2021, April 13). *Perangkat Desa Menurut Kecamatan di kabupaten Tulungagung, 2021*. Retrieved from Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung (tulungagungkab.bps.go.id): <https://tulungagungkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/NTEzOCMx/perangkat-desa-menurut-kecamatan-di-kabupaten-tulungagung--2020.html>